



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor: 66/HM.00/XI/2023**

**Perkuat Kolaborasi dengan *Stakeholders*, Komnas HAM Gelar Konferensi Regional
“Gerak Bersama Memerangi Perdagangan Orang di ASEAN”**

Praktik perdagangan orang menjadi persoalan serius di Indonesia dan mengancam masyarakat terutama perempuan dan anak. Kurun waktu 2021 s/d September 2023, Komnas HAM menerima dan memproses pengaduan mengenai Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 68 aduan. Beberapa aduan, di antaranya *undocumented migrant workers*, kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), *scamming* hingga pengabaian perlindungan buruh migran di luar negeri. Aduan terjadi di beberapa negara di antaranya Tiongkok, Arab Saudi, Irak dan Malaysia.

Komnas HAM pun meletakkan isu TPPO menjadi salah satu isu prioritas lembaga. Sebagai komitmen dalam mencegah dan menangani TPPO, Komnas HAM telah membentuk Tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tim bertugas melakukan pemantauan terhadap Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Tim juga melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan penanganan kasus.

“Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi persoalan serius di Indonesia. Banyak pelanggaran HAM di dalam kasus-kasus TPPO. Dalam penanganannya, nilai-nilai HAM masih sering terabaikan,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah saat pembukaan Konferensi Regional Gerak Bersama Memerangi Perdagangan Orang di ASEAN bertema “Memperkuat Kerjasama Regional dalam Penanganan Orang dan Pelindungan Pekerja Migran yang Berperspektif HAM dan Responsif Gender di ASEAN” di Bali pada 7-8 November 2023.

Sebagai komitmen dalam menghentikan TPPO, Komnas HAM bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Bali, *International Labour Organization* (ILO), *International Organization for Migration* (IOM), dan *The Asia Foundation* (TAF) menyelenggarakan konferensi tingkat regional.

Konferensi ini didaulat sebagai ruang diskusi dan berbagi pengalaman dalam pencegahan dan penanganan TPPO yang responsif gender di ASEAN. “Konferensi ini merupakan momentum pertama mempertemukan berbagai pihak di antaranya pemerintah, organisasi sipil masyarakat, komunitas, serikat buruh, lembaga HAM, CSO internasional.” ucap Anis.

Penyelenggaraan konferensi ini merupakan upaya untuk menguatkan komitmen berbagai pihak dalam menghentikan praktik perdagangan orang di kawasan ASEAN. “Penting untuk terus mendorong komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam rangka mengimplementasikan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak serta ketiga deklarasi yang disepakati dalam KTT ASEAN ke 42,” terang Anis.

Anis mengatakan pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan dukungan dari semua pihak. “Perlu adanya langkah bersama dalam menghentikan TPPO. Salah satunya dengan memperkuat kerja sama baik bilateral maupun regional di kawasan ASEAN. Kerja sama dengan multipihak menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan TPPO,” terangnya.

Konferensi melibatkan partisipasi dari berbagai pihak di antaranya pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi sipil masyarakat, komunitas pekerja migran, lembaga HAM baik di tingkat nasional maupun ASEAN, organisasi tingkat internasional, akademisi hingga media.

Kegiatan konferensi ini terdiri dari 6 diskusi pleno dan 2 diskusi tematik. Diskusi pleno terdiri dari Pleno 1 *The Situation of Trafficking and Protection of the Migrant Workers in ASEAN and the NHRI Responses*; Pleno 2 *ASEAN Countries Commitment to Eradicate Trafficking and Ensure the Protection*; Pleno 3 *Challenges and Opportunities of ASEAN Countries in the implementation of ACTIP and ASEAN Protection of Migrant Workers*; Pleno 4 *Regional Cooperation in Law Enforcement and victim protection on Trafficking in ASEAN*; Pleno 5 *Misuse of Technology in Trafficking in Persons (Scamming)*; dan Pleno 6 *Application of Business and Human Rights Principles in the Prevention of Trafficking*.

Sementara itu, diskusi tematik terdiri dari Tematik 1 *Sharing Good Practices in Trafficking Prevention* dan Tematik 2 *Sharing Good Practices in Recovery for Trafficking Victims*. Pelaksanaan sesi diskusi melibatkan partisipasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Polri, Migrant CARE, Jaringan Buruh Migran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Trunojoyo, Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, lembaga HAM di ASEAN maupun internasional.

Komnas HAM berharap dengan terlaksanakannya konferensi ini dapat melahirkan pola/model kerja sama untuk memerangi TPPO di kawasan ASEAN. Dalam upaya pencegahan dan penanganan praktik perdagangan orang, Komnas HAM terus mendorong berbagai pihak mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, terlebih dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban TPPO.

Bali, 6 November 2023

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Anis Hidayah

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM